



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 10
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 6 Juni 2022
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Pembicaraan Pendahuluan Pembahasan RAPBN TA 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 37 (tiga puluh tujuh) Anggota Komisi II DPR RI dari 47 (empat puluh tujuh) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI C. Kepala Badan Kepegawian Negara RI D. Kepala Lembaga Administrasi Negara RI E. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara RI F. Kepala Arsip Nasional RI G. Ketua Ombudsman RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Kepala Badan Kepegawian Negara RI, Kepala Lembaga Administrasi Negara RI, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara RI, Kepala Arsip Nasional RI, dan Ketua Ombudsman RI, dengan agenda pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN TA 2023 dan rencana kerja pemerintah Tahun 2023, hari Senin, 6 Juni 2022, dibuka pukul 10.05 WIB oleh Ketua Komisi

II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, Kepala Lembaga Administrasi Negara RI, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara RI, Kepala Arsip Nasional RI, dan Ketua Ombudsman RI, dengan agenda pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN TA 2023 dan rencana kerja pemerintah Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI yang diwakilkan oleh Sekretaris Kementerian menyampaikan Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2023 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebesar **Rp281.843.164.000,-** (*dua ratus delapan puluh satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah*), termasuk di dalamnya adalah anggaran untuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebesar **Rp54.756.718.000,-** (*lima puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah*), untuk dibahas secara mendalam pada Rapat pembahasan RAPBN Tahun 2023 selanjutnya.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara menyampaikan Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2023 Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebesar **Rp585.409.844.000,-** (*lima ratus delapan puluh lima milyar empat ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah*), untuk dibahas secara mendalam pada Rapat pembahasan RAPBN Tahun 2023 selanjutnya.
3. Kepala Lembaga Administrasi Negara menyampaikan Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2023 Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebesar **Rp308.012.174.000,-** (*tiga ratus delapan milyar dua belas juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah*), untuk dibahas secara mendalam pada Rapat pembahasan RAPBN Tahun 2023 selanjutnya.
4. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia menyampaikan Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2023 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebesar **Rp259.414.701.000,-** (*dua ratus lima puluh sembilan milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus satu ribu rupiah*), untuk dibahas secara mendalam pada Rapat pembahasan RAPBN Tahun 2023 selanjutnya.

5. Ketua Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2023 Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebesar **Rp234.047.920.000,-** (*dua ratus tiga puluh empat milyar empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*), untuk dibahas secara mendalam pada Rapat pembahasan RAPBN Tahun 2023 selanjutnya.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat pada R Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, Kepala Lembaga Administrasi Negara RI, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara RI, Kepala Arsip Nasional RI, dan Ketua Ombudsman RI, dengan agenda pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN TA 2023 dan rencana kerja pemerintah Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI telah mendengarkan penyampaian Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2023:
 - a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebesar **Rp281.843.164.000,-** (*dua ratus delapan puluh satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah*), termasuk di dalamnya adalah anggaran untuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebesar **Rp54.756.718.000,-** (*lima puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah*);
 - b. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebesar **Rp585.409.844.000,-** (*lima ratus delapan puluh lima milyar empat ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah*);
 - c. Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebesar **Rp308.012.174.000,-** (*tiga ratus delapan milyar dua belas juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah*);
 - d. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebesar **Rp259.414.701.000,-** (*dua ratus lima puluh sembilan milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus satu ribu rupiah*);
 - e. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebesar **Rp234.047.920.000,-** (*dua ratus tiga puluh empat milyar empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*).

Terkait hal tersebut, Komisi II DPR RI akan membahasnya secara mendalam pada rapat pembahasan RAPBN Tahun 2023 selanjutnya.

2. Mengingat ruang lingkup pembahasan sangat luas maka usulan tambahan anggaran dan usulan penyesuaian anggaran/pergeseran alokasi anggaran per program RAPBN Tahun 2023 yang diusulkan Kementerian PANRB, BKN RI, KASN RI, LAN RI, ANRI, dan ORI,

Komisi II DPR RI akan membahasnya secara mendalam pada Raker/RDP RAPBN Tahun 2023 yang akan datang.

3. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian PANRB, BKN, LAN, KASN, ANRI, dan ORI untuk segera menyampaikan pagu alokasi anggaran tahun 2022 dan rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan tiga) beserta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR RI paling lambat Jumat, 10 Juni 2022, sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2023 yang akan datang.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.07 WIB.

Jakarta, 6 Juni 2022

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270